

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Arsyad (2015) pembangunan ekonomi disuatu daerah perlu adanya dorongan antara Pemda dan masyarakat untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada, menjalin relasi diantara instansi pemerintah dengan pihak swasta serta mendorong berkembangnya terkait aktivitas ekonomi daerah. Pada dasarnya pembangunan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional sebab pemda dan masyarakat lokal perlu adanya koordinasi untuk memanfaatkan, membuat, mengembangkan dan menghasilkan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa karena perbedaan karakteristik sosial, budaya bahkan geografis setiap daerah, maka pembangunan harus memperhatikan potensi dan keragaman daerah maka diperlukan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah guna mencapai pembangunan yang optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahap pertama, pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya antara lain, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknis (Suparmoko, 2012).

Pembangunan masyarakat di negara berkembang diarahkan pada pembangunan ekonomi karena keterbelakangan ekonominya. Pembangunan di bidang ekonomi dapat membantu mencapai tujuan dan merangsang perubahan dan pembaruan di sektor kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan dan pertumbuhan

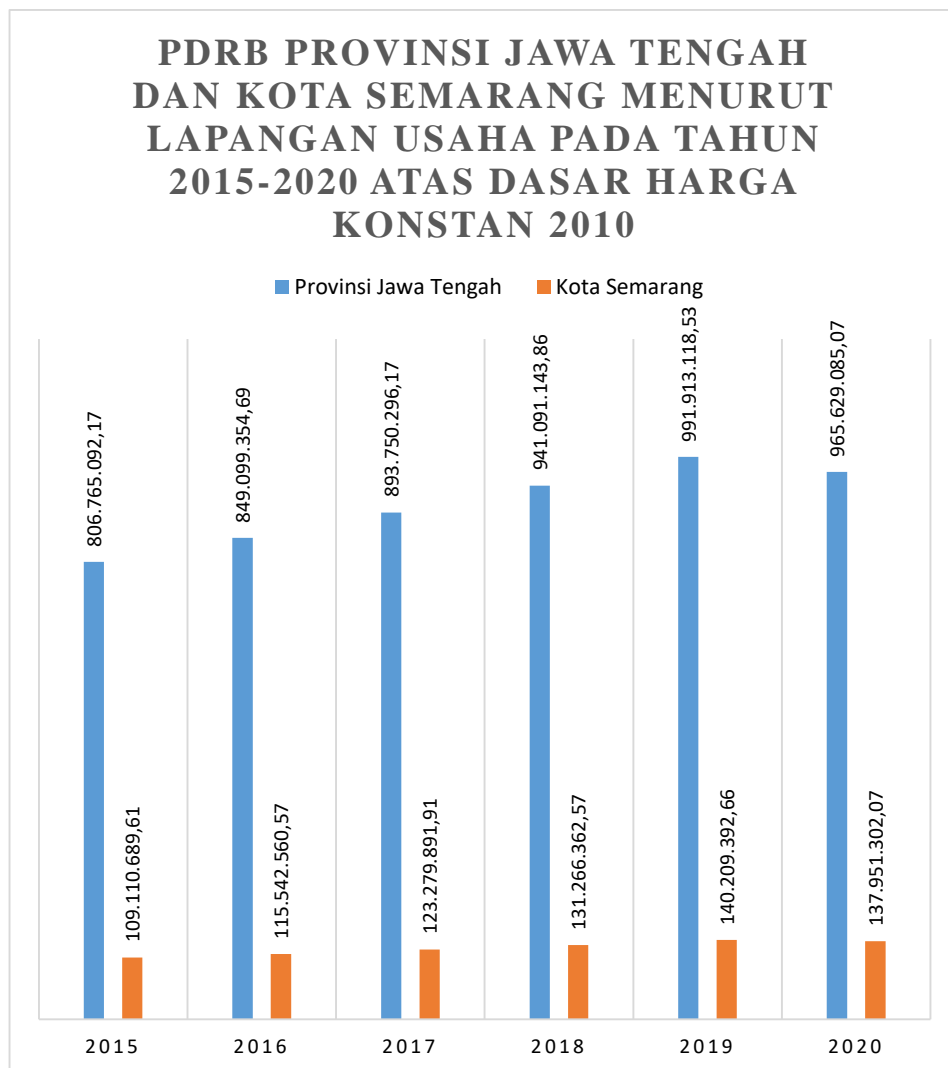
ekonomi mendapat banyak perhatian dan telah menjadi kebutuhan bersejarah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis menurut UUD 1945. Dalam arti pembangunan negara dilakukan oleh setiap aspek kehidupan dan bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran (Anonim, 2018). Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan beragam kesempatan kerja di masyarakat (Tumangkeng, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membentuk dan mengembangkan ekonomi lokal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk kelanjutan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak jauh berbeda dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Namun, proses pembangunan daerah jauh lebih spesifik. Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas dan taraf hidup yang diukur dari PDB di tingkat nasional dan PDRB di tingkat regional (Tambunan, 2011). Pertumbuhan PDRB tidak terlepas dari peran masing-masing sektor ekonomi. Besarnya kontribusi pendapatan pada masing-masing sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan dan pertumbuhan daerah. Semakin besar kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Secara umum, pembangunan nasional di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan lebih banyak prioritas di bidang pembangunan ekonomi. Menurut (Mudrajad, 2010), pembangunan ekonomi adalah proses

penciptaan lingkungan oleh masyarakat yang mempengaruhi hasil indikator ekonomi seperti peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses untuk mencapainya adalah pembangunan. Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia yang beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan baik itu kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota maupun kesenjangan antara golongan pendapatan.

Menurut (Antonescu, 2012) kesenjangan antar wilayah dan di dalam wilayah terjadi akibat konsentrasi, aglomerasi, tren yang dipicu oleh fenomena eksternal, globalisasi, integrasi, atau fenomena internal, *clustering*, munculnya kutub pertumbuhan/pengembangan, keterlibatan lembaga lokal dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, dan lain-lain. Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa disebabkan karena tiap daerah memiliki potensi unggul yang bisa digali dan dikembangkan yang berbeda-beda dan setiap daerah memiliki ciri khas mengenai potensi daerahnya. Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta pembangunan yang dilakukan di setiap daerah diorientasikan agar benar-benar sesuai dengan prioritas dan kemungkinan daerah. Pembangunan daerah adalah proses dimana pemerintah daerah mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah, kota atau swasta dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mengembangkan yang sudah ada (Sjafrizal, 2016). Suatu daerah dapat

mendorong pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor yang dapat menjadi unggulan dari daerah tersebut. Sektor unggulan ini perlu ditentukan berdasarkan wilayah karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi kesuburan tanah, letak geografis, sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada. Masing-masing daerah diuntungkan oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam, terbukti dengan pertumbuhan dan peran sektor-sektor yang terlibat. Identifikasi dan klasifikasi sektor memberikan gambaran sektor mana yang menjadi basis kegiatan ekonomi, sektor mana yang unggul, potensial, berkembang dan tertinggal dalam mengidentifikasi sektor prioritas. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan sektor dasarnya, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sektor ekonomi daerah secara optimal (Haryanto, 2014). Keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang biasa digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang paling sering digunakan adalah PDRB, yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian secara umum dan sebagai indikator kemajuan daerah. Indikator lainnya adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2016).



Gambar 1.1 PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, 2021

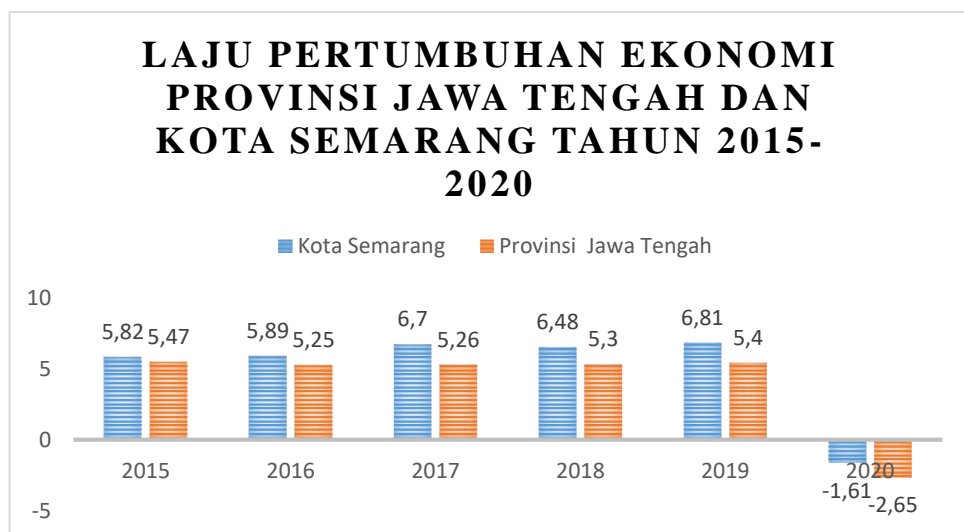
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan daerah Kota Semarang mengalami kemajuan dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat PDRB maka semakin baik pula laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada diagram diatas yang menunjukan bahwasanya nilai PDRB Kota Semarang pada tahun 2015 sebesar 109,110,689.61, tahun 2016 sebesar 115,542,560.57, tahun 2017 sebesar

123,279,891.91, tahun 2018 sebesar 131,266,362.57, tahun 2019 sebesar 140,209,392.66 dan pada tahun 2020 sebesar 137,951,302.07. Sehingga nilai PDRB di Kota Semarang pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan secara terus menerus, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 2,26 juta rupiah dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat pada diagram diatas bahwa nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 806,765,092.17, tahun 2016 sebesar 849,099,354,69, tahun 2017 sebesar 893,750,296.17, tahun 2018 sebesar 941,091,143.86, tahun 2019 sebesar 991,913,118.53 dan tahun 2020 sebesar 965,629,085.07. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap tahunnya nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan semakin baik.

Nilai PDRB Kota Semarang berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 140,21 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 137,95 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kota Semarang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sekitar 1,61 %. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Semarang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan yaitu mencapai 28,64 % (angka ini sedikit naik dari 27,81 % di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 26,07 % (turun dari 26,67 % di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 13,40% (turun dari 13,91% di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar

9,56 % (naik dari 7,02 % di tahun 2016) dan asuransi sebesar 4,31 % (turun dari 4,48 % di tahun 2016). Diantara kelima lapangan usaha tersebut, sektor industri pengolahan dan informasi dan komunikasi peranannya terlihat semakin meningkat. Sebaliknya sektor konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Semarang terus mengalami penurunan dalam periode 2016- 2020. Pada tahun 2016 peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 0,94 % dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,86 % (Anonim, 2020).



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Dan Kota Semarang Tahun 2015-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, 2021

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB, sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai oleh masyarakat

seringkali sebagai indikator kesuksesan suatu wilayah dalam mencapai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Dapat dilihat pada diagram diatas bahwasanya pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhannya sebesar -1.61% dan -2.65%. Ada beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satunya adalah melihat PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita maka tingkat kesejahteraan penduduknya semakin baik. Sebaliknya, jika PDRB per kapita yang lebih kecil maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan rendah.

Hal ini yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Pandemi covid-19 berdampak luar biasa terhadap dunia, kondisi perekonomian nasional dan regional, termasuk di Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah sempat terjadi resesi di tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010, pada tahun 2019 pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.4% menurun drastis menjadi -2.65%. Dari sisi produksi, terjadi penurunan pada 11 lapangan usaha. Sektor usaha transportasi dan pergudangan turun paling banyak -33.15%. Penurunan terdalam berikutnya di sektor jasa lainnya (termasuk lapangan usaha seni, hiburan, dan rekreasi) turun menjadi -8,01% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, turun sebesar -7,98%. Dapat dicatat bahwa ketiga sektor tersebut adalah sektor yang bergantung pada mobilitas penduduk. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *work from home*, pembelajaran yang dilakukan secara

daring, larangan mudik dan pembatasan transportasi selama perayaan hari libur sehingga dapat menekan seluruh sektor terutama ketiga sektor tersebut. Sementara itu sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh pesat 15.65% yang menjadikan sektor dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020, namun kontribusi terhadap PDRB hanya sekitar 4.26%. Adanya peningkatan yang pesat antara pertumbuhan dengan peningkatan kebutuhan pertemuan secara virtual.

Dari sisi kontribusi dengan laju pertumbuhan sebesar -37.4% di sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar perekonomian di Jawa Tengah sebesar 34.52%, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang perekonomian di Jawa Tengah sebesar 13.48% dengan pertumbuhan riil menjadi -3.80%. Dari sisi pengeluaran, penurunan terbesar terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar sebesar -14.82%. Namun, karena komponen impor barang dan jasa merupakan komponen yang dapat menurunkan PDRB, maka penyusutan komponen tersebut menjadi penghambat penurunan PDRB lebih besar. Adapun komponen yang tidak menjadi penghambat penyusutan PDRB dan mencatat penurunan terbesar adalah komponen ekspor barang dan jasa serta komponen Produk Modal Tetap Daerah (PMTB) dengan penurunan -13.84% dan 6.98%. Kondisi ini sejalan dengan penurunan permintaan dari negara tujuan untuk ekspor Jawa Tengah. Pandemi covid-19 dan pengalihan belanja telah menunda proyek pembangunan swasta ataupun pemerintah menghambat pertumbuhan

komponen PMTB sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan yang lebih lambat dari komponen belanja pemerintah sebesar -4,30%.

Ada berbagai macam penelitian mengenai potensi ekonomi, salah satunya yang dilakukan oleh Zakia (2020) melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2016-2017 ada 4 sektor basis diantaranya sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3 sektor. Sektor basis di Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018 yaitu sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 3 tahun tidak terdapat penambahan maupun pengurangan sektor basis, dikarenakan pertumbuhan tiap sektor di Kabupaten Mojokerto masih stabil. Sedangkan dari analisis Share Share pada tahun 2016-2018 di kabupaten Sidoarjo ada 6 sektor sedangkan di Kabupaten Mojokerto ada 9 sektor yang kompetitif, artinya sektor tersebut unggul dan tumbuh dan relatif cepat serta kompetitif.

Fatchur Rozci (2019), melakukan penelitian di kabupaten Gresik. Diperoleh hasil analisis LQ terhadap PDRB di Kabupaten Gresik periode 2014-2017 diketahui bahwa terdapat tiga sektor basis yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ sebesar 2,14, sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai LQ sebesar 1,69, dan sektor industri pengolahan dengan nilai LQ sebesar 1,63. Sedangkan hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sektor yang tergolong dalam kuadran I atau kriteria sektor maju dan tumbuh cepat yaitu sektor industri pengolahan dan

sektor pengadaan listrik dan gas, sementara di kuadran II terdapat 12 sektor perekonomian yang tergolong berkembang cepat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Kemudian pada kuadran III yaitu yang maju namun tumbuh lambat adalah sektor pertambangan dan penggalian, terakhir pada kuadran IV yaitu sektor yang relatif tertinggal adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor transportasi dan pergudangan.

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2020 pertumbuhan di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sama-sama dipengaruhi oleh sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa perusahaan. Ketiga sektor tersebut mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pertumbuhan di tahun 2020 keduanya menurun bahkan mencapai -1,61 dan -2,65 hal itu dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian hampir seluruh daerah menurun sehingga berdampak salah satunya pada sektor ekonomi di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau jawa yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota termasuk salah satunya yaitu Kota Semarang (Anonim, Badan Pusat Statistik, 2021). Kota Semarang merupakan penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah. Berdasarkan data indikator perekonomian Kota Semarang tahun 2021 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Semarang, situasi perekonomian Kota Semarang secara umum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dengan nominal PDRB tahun 2015-2019 mengalami peningkatan secara terus-menerus sebesar 14,020,939,266 juta rupiah, tetapi pada tahun 2020 sebesar 137.951.302,07 juta rupiah, mengalami penurunan. Sebagai pusat ekonomi dan sentra perdagangan dan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk berkembang melampaui kota-kota lain di Jawa Tengah melalui strategi pengembangan wilayah yang tepat berdasarkan potensi sektor ekonomi di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki tiga sektor utama yang berkontribusi terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan sebesar 36.143.142,48, konstruksi sebesar 34.183.828,86, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19.669.323,68.

Penelitian ini melihat perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian dan menunjukkan sektor basis dan non basis. Penelitian ini menghubungkan analisis LQ, *Shift Share* dan Tipologi Klassen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu Kota Semarang dalam mengembangkan potensi sektor ekonomi yang ada supaya bisa

mensejahterahkan masyarakat sekitar. Terhadap latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik untuk memilih Kota Semarang, karena Kota Semarang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis lebih lanjut “**Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dengan Metode LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen Di Kota Semarang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja yang termasuk sektor basis dan non basis untuk menunjang perekonomian di Kota Semarang?
2. Bagaimana potensi sektor ekonomi dan analisis sektor unggulan di Kota Semarang?
3. Bagaimana tipologi klassen di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis untuk menunjang perekonomian di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi dan analisis sektor unggulan di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui tipologi klassen di Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menjelaskan adanya potensi sektor ekonomi dan sektor basis di Kota Semarang. Objek penelitian ini berada di Kota Semarang pada periode 2015-2020. Data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari publikasi BPS.

1.5 Manfaat penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai potensi apa saja yang ada dan sektor apa yang menjadi unggulan di wilayah tersebut.
2. Sebagai tugas akhir perkuliahan penyusun untuk meraih predikat sarjana.
3. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi untuk menambah pembendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Sebagai referensi kepada peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pengambil keputusan pembangunan ekonomi di Kota Semarang.

